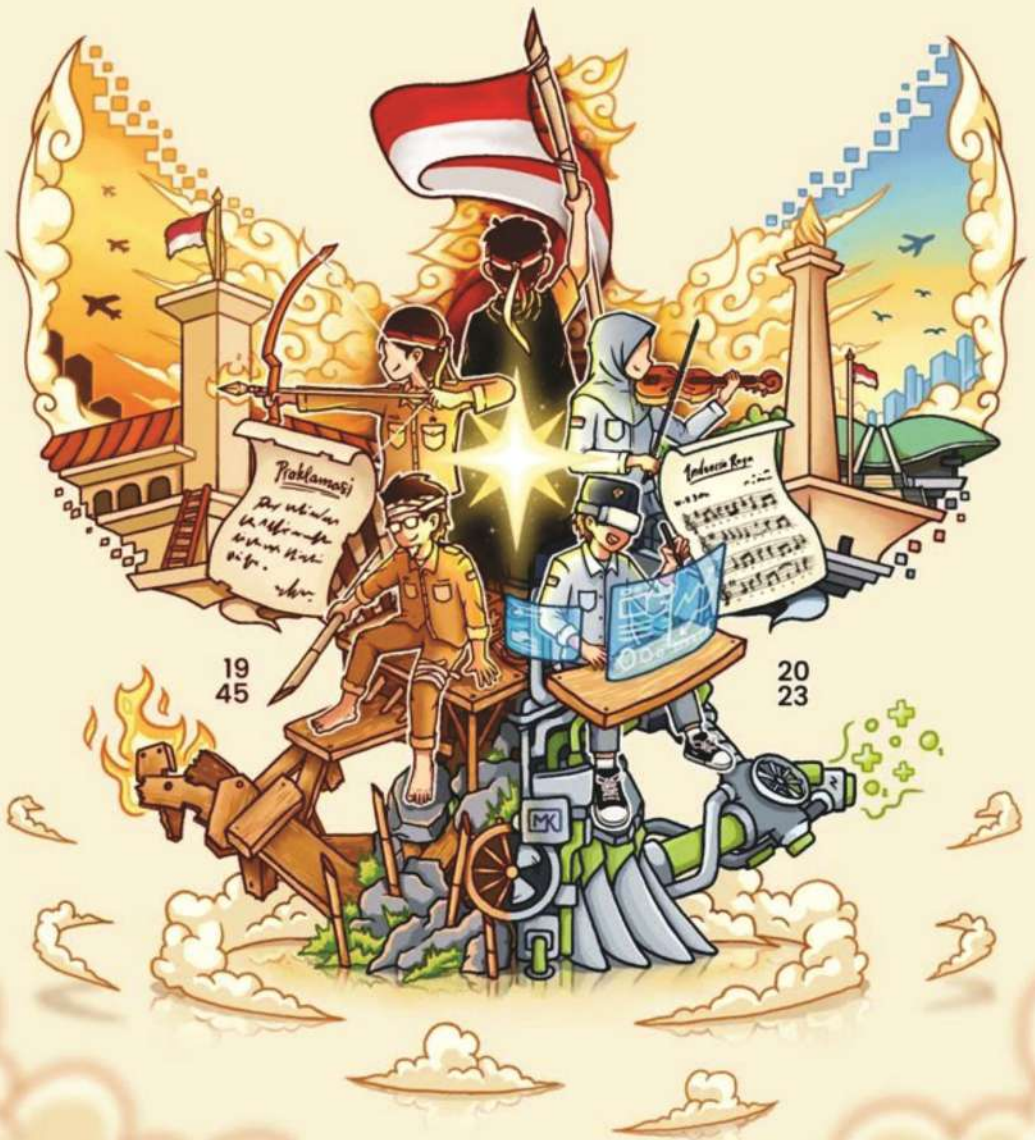


Dr. Lili Halimah, M.Pd.



KONSEP DAN PRAKTIK PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN



KONSEP DAN PRAKTIK PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA **KEWARGANEGARAAN**

Dr. Lili Halimah, M.Pd.



**KONSEP DAN PRAKTIK
PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN**

Penulis:

Dr. Lili Halimah, M.Pd.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Iskandar Ahmaddien, S.ST., S.E., S.H., M.M.

ISBN:

978-634-246-442-7

Cetakan Pertama:

Januari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setulus-tulusnya kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul “Konsep dan Praktik Pendidikan Sosial Budaya Kewarganegaraan”, dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam khazanah keilmuan, sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi siapa pun yang memiliki perhatian dan minat terhadap isu-isu pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif sosial dan budaya.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk menghadirkan pendekatan konseptual dan aplikatif dalam memahami dinamika kewarganegaraan di tengah realitas masyarakat yang multikultural, dinamis, dan terus berubah. Kami berharap, isi buku ini dapat memperkaya wawasan akademik dan menjadi landasan dalam praktik pendidikan yang lebih kontekstual, transformatif, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Namun, kami juga menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Sebagaimana pepatah mengatakan, *“tiada gading yang tak retak”*, maka demikian pula halnya dengan buku ini. Kami menyambut dengan terbuka segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari para pembaca, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan upaya perbaikan karya di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun peradaban bangsa yang cerdas, inklusif, dan berkeadaban.

Januari, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN	1
A. Konsep Dasar: Pendidikan, Kewarganegaraan, Sosial, dan Budaya	1
B. Tujuan dan Urgensi Pembelajaran	3
C. Karakteristik Interdisipliner Bidang Ini	5
D. Relevansi dengan Dinamika Global dan Lokal	6
E. Posisi dalam Pendidikan Nasional dan Kurikulum Tinggi	8
F. Resume	10
G. Evaluasi	11
BAB 2 HAKIKAT KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN BUDAYA	13
A. Definisi Kewarganegaraan: Yuridis vs Sosiologis	13
B. Konstruksi Identitas Warga Negara dalam Masyarakat Majemuk	16
C. Multikulturalisme dan Kohesi Sosial	18
D. Warga Negara Aktif: Dari Hak-Hak Sipil ke Tanggung Jawab Sosial	20
E. Teori Kewarganegaraan Global dan Kosmopolitanisme	22
F. Resume	24
G. Evaluasi	25
BAB 3 NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN	27
A. Kearifan Lokal sebagai Sumber Nilai Kebangsaan	27
B. Pancasila sebagai Nilai Dasar dalam Kehidupan Sosial Budaya	29
C. Pluralitas Budaya dan Integrasi Bangsa	32
D. Peran Adat, Tradisi, dan Lembaga Kultural	34
E. Tantangan Modernisasi dan Komersialisasi Budaya	36
F. Resume	38
G. Evaluasi	39
BAB 4 IDENTITAS NASIONAL DAN DINAMIKA KEBINEKAAN	41
A. Konsep Identitas Nasional	41
B. Proses Pembentukan Identitas Kolektif	42
C. Bhineka Tunggal Ika dalam Praktik Sosial	44
D. Identitas Nasional vs Identitas Lokal dan Global	46
E. Media Sosial dan Konstruksi Identitas Generasi Muda	48
F. Resume	50

G. Evaluasi	51
BAB 5 SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA	53
A. Mekanisme Sosialisasi Politik Sejak Dini	53
B. Peran Keluarga, Sekolah, dan Media	55
C. Budaya Politik Masyarakat Indonesia	57
D. Partisipasi Politik: Hak, Peran, dan Tantangan	59
E. Sikap Kritis terhadap Hoaks dan Disinformasi Politik	60
F. Resume	62
G. Evaluasi	62
BAB 6 PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN TOLERANSI	65
A. Prinsip Dasar Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa	65
B. Demokrasi sebagai Budaya Hidup Bersama	66
C. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Demokrasi	68
D. Toleransi sebagai Sikap Kewargaan	70
E. Studi Kasus: Praktik Intoleransi dan Solusi Pendidikan	72
F. Resume	73
G. Evaluasi	74
BAB 7 GLOBALISASI DAN TANTANGAN KEWARGANEGARAAN	77
A. Arus Globalisasi dan Dampaknya pada Nilai Sosial Budaya	77
B. Transformasi Identitas dalam Era Digital	78
C. <i>Citizenship Education in Global Context</i>	80
D. Isu Migrasi, Kewarganegaraan Ganda, dan Diaspora	82
E. Ketahanan Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Benteng	85
F. Resume	86
G. Evaluasi	87
BAB 8 HAK ASASI MANUSIA DAN Keadilan Sosial	89
A. Konsep Dasar HAM dalam Perspektif Lokal dan Global	89
B. Perkembangan HAM di Indonesia	91
C. Hak Kolektif Komunitas Adat dan Minoritas	93
D. Keadilan Sosial dan Kesetaraan Akses	95
E. Studi Kasus Pelanggaran HAM dan Rekonsiliasi Budaya	97
F. Resume	99
G. Evaluasi	100
BAB 9 KONFLIK SOSIAL DAN RESOLUSI DAMAI	103
A. Akar Sosiokultural Konflik di Indonesia	103
B. Pendekatan Resolusi Konflik Berbasis Budaya <i>Local</i>	104
C. Pendidikan Perdamaian dan Rekonsiliasi Antarbudaya	106
D. Peran Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat	107
E. Mediasi dan Negosiasi dalam Masyarakat Plural	110
F. Resume	114

G. Evaluasi	115
BAB 10 LITERASI SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN DIGITAL.....	117
A. Konsep Literasi Sosial Budaya di Era Digital	117
B. Media Digital sebagai Arena Pembentukan Opini Kewargaan	119
C. Etika Digital dan Tanggung Jawab Warga Net	120
D. <i>Cyber Citizenship</i> dan Kebebasan Berekspresi	122
E. Pencegahan Ujaran Kebencian dan Ekstremisme Daring.....	123
F. Resume	124
G. Evaluasi	125
BAB 11 TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	
KEWARGAAN.....	127
A. Dinamika Perubahan Sosial di Era Revolusi Industri 4.0	127
B. Perubahan Nilai dan Gaya Hidup Generasi Muda	130
C. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal	132
D. Kepemimpinan Sosial dan Gerakan Warga	136
E. Praktik Baik: <i>Civic Engagement</i> dan <i>Community Empowerment</i>	138
F. Resume	141
G. Evaluasi	142
BAB 12 CONTOH PRAKTIK PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA	
KEWARGANEGARAAN DI MASYARAKAT	145
A. Studi Lapangan: Observasi dan Refleksi Sosial Budaya	145
B. Kegiatan Proyek Kewarganegaraan (<i>Civic Project</i>)	146
C. Integrasi Nilai Sosial Budaya dalam Kehidupan Kampus	148
D. Kolaborasi Lintas Komunitas dan Advokasi Warga.....	149
E. Refleksi Kritis: Dari Teori ke Praktik Partisipasi Kewargaan	151
F. Resume	152
G. Evaluasi	153
GLOSARIUM	156
DAFTAR PUSTAKA.....	166
PROFIL PENULIS.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Definisi Kewarganegaraan (Yuridis vs Sosiologis).....	15
Tabel 4.1 Perbandingan Identitas Nasional, Lokal, dan Global	46
Tabel 5.1 Perbandingan Peran Keluarga, Sekolah, dan Media dalam Sosialisasi Politik Sejak Dini	56
Tabel 7.1 Isu Migrasi, Kewarganegaraan Ganda, dan Diaspora	82
Tabel 8.1 Perbandingan Konsep Dasar HAM: Perspektif Global dan Lokal	91
Tabel 8.2 Keadilan Sosial dan Kesetaraan Akses	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Multikulturalisme	18
Gambar 3.1 Perbandingan Komprehensif antara Tiga Elemen Penting dalam Kehidupan Budaya Masyarakat	34
Gambar 4.1 Proses Pembentukan Identitas Kolektif.....	42
Gambar 8.1 Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.....	92
Gambar 11.1 Cara Menavigasi Perubahan Sosial di Era Industri 4.0.....	127

BAB 1

PENGANTAR PENDIDIKAN

SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN

A. KONSEP DASAR: PENDIDIKAN, KEWARGANEGARAAN, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pemahaman mengenai pendidikan, kewarganegaraan, sosial, dan budaya merupakan fondasi utama dalam mengkaji dinamika pendidikan sosial budaya kewarganegaraan. Keempat konsep tersebut saling terkait dan bersama-sama membentuk kerangka berpikir tentang bagaimana individu dibina, diarahkan, dan dibentuk menjadi warga negara yang berpengetahuan serta berkarakter. Dalam konteks kehidupan nasional yang semakin kompleks, landasan konseptual ini menjadi penting untuk merumuskan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Pengantar

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pemahaman terhadap konsep dasar pendidikan, kewarganegaraan, sosial, dan budaya menjadi suatu kebutuhan mendesak. Keempat konsep ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling memengaruhi dalam pembentukan karakter individu maupun pembangunan masyarakat secara luas. Pendidikan menjadi sarana utama dalam mentransformasikan nilai-nilai sosial dan budaya ke dalam kesadaran individu, sekaligus memperkuat identitas dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, integrasi konsep-konsep ini sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial, membangun toleransi, serta membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka demokrasi dan keberagaman budaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masing-masing konsep dasar ini perlu dilakukan secara mendalam dan komprehensif agar pembelajaran di bidang ini tidak bersifat parsial, tetapi utuh dan relevan dengan konteks kehidupan nyata.

2. Konsep Dasar Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sadar, terencana, dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Pendidikan tidak semata-mata berfokus pada transmisi pengetahuan, melainkan juga pada pengembangan nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat.

BAB 2

HAKIKAT KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN BUDAYA

A. DEFINISI KEWARGANEGARAAN: YURIDIS VS SOSIOLOGIS

1. Pengantar

Kewarganegaraan merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik, hukum, dan pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman terhadap definisi kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Keduanya memiliki dasar pemikiran, ruang lingkup, serta implikasi yang berbeda dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai warga negara dan bagaimana mereka menjalankan hak serta kewajibannya. Dalam praktiknya, perbedaan pemaknaan ini sangat memengaruhi cara suatu negara membangun relasi antara individu dengan negara, serta memengaruhi pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan dalam institusi pendidikan. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara pendekatan yuridis dan sosiologis menjadi penting sebagai landasan awal dalam memahami identitas dan partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Definisi Kewarganegaraan Secara Yuridis

Pendekatan yuridis melihat kewarganegaraan sebagai status hukum yang diberikan oleh suatu negara kepada individu tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Status ini menetapkan hubungan resmi antara individu dengan negara, yang ditandai dengan pengakuan hak dan kewajiban secara legal. Dalam konteks ini, seseorang disebut warga negara apabila telah memenuhi kriteria formal seperti kelahiran, pewarganegaraan (*naturalization*), perkawinan, atau proses hukum lain yang diatur oleh undang-undang kewarganegaraan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, misalnya, mengatur bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh berdasarkan asas *ius sanguinis* (hak darah) dan *ius soli* terbatas (hak tempat lahir). Dalam perspektif ini, warga negara adalah subjek hukum yang memiliki identitas sah secara administrasi. Kewarganegaraan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat formal, statis, dan bersumber dari legalitas yang ditetapkan oleh negara (Isin & Turner, 2002).

BAB 3

NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

A. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER NILAI KEBANGSAAN

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang berkembang dan dijaga oleh masyarakat secara turun-temurun dalam konteks lokal. Ia tidak hanya mencerminkan cara hidup masyarakat setempat, tetapi juga menjadi sistem pengetahuan, nilai, dan norma yang relevan untuk mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan keragaman budaya, kearifan lokal menjadi sumber penting bagi pembentukan identitas nasional serta integrasi sosial. Menurut Keraf (2010), kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional mengenai lingkungan dan kehidupan mereka yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan praktis. Oleh karena itu, kearifan lokal memiliki potensi besar untuk dijadikan fondasi dalam membangun nilai-nilai kebangsaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap alam sebenarnya telah lama hadir dalam praktik kehidupan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Misalnya, dalam budaya Jawa dikenal prinsip “rukun” sebagai dasar hubungan sosial yang harmonis; di Bali ada konsep “Tri Hita Karana” yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan; di Minangkabau terdapat sistem “musyawarah mufakat” dalam mengambil keputusan kolektif; sementara dalam budaya Bugis dikenal istilah “siri na pacce” yang berarti harga diri dan solidaritas sosial. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal mengandung nilai-nilai kebangsaan yang dapat dijadikan landasan dalam pembentukan karakter warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009), kearifan lokal merefleksikan nilai-nilai moral yang terbukti mampu menjaga keberlanjutan masyarakat dan lingkungan secara kontekstual.

Penelitian Halimah dan Guntara (2017) menunjukkan bahwa budaya Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang mengandung nilai tuntunan dan tontonan yang diwariskan secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, alam, sesama, dan bangsa. Tokoh adat berperan besar dalam mensosialisasikan dan meneruskan nilai-nilai tersebut

BAB 4

IDENTITAS NASIONAL DAN DINAMIKA KEBINEKAAN

A. KONSEP IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional adalah konsep yang mencerminkan kesadaran kolektif suatu bangsa terhadap karakteristik, nilai, simbol, dan sejarah bersama yang membedakannya dari bangsa lain. Konsep ini berkaitan erat dengan perasaan memiliki dan kebanggaan terhadap negara, serta keterikatan emosional warga negara terhadap simbol dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa. Berikut adalah penjelasan konsep identitas nasional menurut beberapa ahli:

1. Benedict Anderson (1991). Dalam bukunya *Imagined Communities*, Anderson menyatakan bahwa bangsa adalah "komunitas politik yang dibayangkan" (*imagined political community*). Identitas nasional terbentuk karena sekelompok orang membayangkan dirinya sebagai bagian dari satu entitas kolektif, meskipun mereka tidak saling mengenal secara pribadi. Media massa, sejarah bersama, dan simbol nasional menjadi alat penting dalam membangun kesadaran tersebut.
2. Erik Erikson (1968). Erikson memandang identitas nasional sebagai bagian dari identitas ego individu yang berkembang dalam konteks sosial dan budaya. Menurutnya, individu membentuk identitas nasional melalui proses internalisasi nilai-nilai budaya dan sosial dari masyarakat tempat mereka tinggal. Identitas ini menjadi stabil jika didukung oleh pendidikan, simbol-simbol nasional, dan pengalaman kolektif.
3. Stuart Hall (1996). Hall melihat identitas sebagai konstruksi sosial yang bersifat dinamis dan berubah-ubah. Identitas nasional menurutnya bukan sesuatu yang tetap, tetapi terus dibentuk oleh praktik diskursif seperti narasi sejarah, media, pendidikan, dan politik. Dalam masyarakat multikultural, identitas nasional harus dibentuk melalui proses inklusif yang mengakomodasi keberagaman.
4. Smith (1991). Anthony D. Smith menyatakan bahwa identitas nasional mencakup unsur sejarah bersama, mitos asal usul, simbol-simbol nasional (seperti bendera, lagu kebangsaan), serta keterikatan terhadap wilayah geografis tertentu. Smith menekankan pentingnya "*ethno-symbolism*" dalam membangun rasa kebangsaan yang kuat dan berkelanjutan.

BAB 5

SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA

A. MEKANISME SOSIALISASI POLITIK SEJAK DINI

Sosialisasi politik merupakan proses penting dalam pembentukan identitas kewarganegaraan seseorang. Proses ini mencakup bagaimana individu mengenal, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, serta perilaku politik dalam masyarakat. Sosialisasi politik sejak dini sangat menentukan kualitas partisipasi politik individu di masa dewasa, termasuk sikap terhadap negara, hak dan kewajiban warga, serta kesadaran akan demokrasi dan keadilan sosial. Almond dan Verba (1963), dalam karyanya *The Civic Culture*, menekankan bahwa budaya politik yang sehat hanya dapat tumbuh apabila nilai-nilai politik ditanamkan secara sistematis sejak usia dini melalui agen-agen sosialisasi yang efektif.

Proses sosialisasi politik pada anak-anak umumnya dimulai dalam lingkungan keluarga, yang merupakan agen sosialisasi primer. Keluarga memberikan fondasi awal mengenai otoritas, aturan, tanggung jawab, dan hubungan sosial yang mendasar. Anak-anak belajar mengenai tata tertib, penghargaan terhadap simbol negara, dan cara berperilaku sebagai warga negara melalui teladan dari orang tua. Menurut Hyman (1959), keluarga memiliki peran paling kuat dalam membentuk orientasi politik awal individu karena anak-anak memandang orang tua sebagai figur otoritatif dan sumber nilai yang terpercaya. Oleh karena itu, interaksi keluarga yang inklusif dan demokratis akan mendorong tumbuhnya kesadaran politik yang partisipatif dan egaliter.

Selain keluarga, sekolah juga memegang peranan sentral sebagai agen sosialisasi politik yang bersifat formal. Melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa diperkenalkan pada konsep-konsep dasar negara, hak asasi manusia, struktur pemerintahan, hingga etika bernegara. Sekolah tidak hanya menyampaikan informasi politik, tetapi juga menjadi ruang praktik nilai-nilai tersebut melalui organisasi siswa, pemilihan ketua OSIS, dan kegiatan musyawarah kelas. Menurut Banks (2008), pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu membentuk sikap kritis, toleransi, dan keterlibatan aktif siswa dalam kehidupan demokratis. Karena itu, kurikulum dan lingkungan belajar di sekolah harus dirancang agar mendukung tumbuhnya kesadaran politik sejak dini.

BAB 6

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN TOLERANSI

A. PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Prinsip dasar demokrasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, dan partisipasi rakyat. Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi sebuah cara hidup yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan musyawarah. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebagaimana ditegaskan oleh Dahl (2000), demokrasi memerlukan perlindungan hak-hak minoritas, partisipasi aktif warga negara, dan jaminan kebebasan sipil dalam proses pengambilan keputusan publik (Dahl, 2000).

Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memegang otoritas tertinggi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Pemilu yang bebas, adil, dan periodik adalah wujud konkret dari prinsip ini. Melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan kehendaknya secara langsung, sekaligus memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat bergantung pada legitimasi dari partisipasi rakyat secara luas, serta perlindungan terhadap hak pilih setiap individu (Tusalem, 2015).

Prinsip kedua yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi hanya akan bermakna apabila negara menjamin kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, serta hak atas persamaan di depan hukum. Tanpa jaminan tersebut, demokrasi berisiko menjadi prosedural semata tanpa isi substantif. Studi oleh Linz dan Stepan (1996) menegaskan bahwa demokrasi sejati harus mencakup perlindungan kebebasan sipil dan hak politik yang merata bagi semua warga negara (Linz & Stepan, 1996).

Prinsip ketiga adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta sistem *checks and balances*. Demokrasi menuntut adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme saling mengawasi ini juga memberi ruang akuntabilitas terhadap kinerja lembaga negara. Menurut studi terbaru, pemisahan kekuasaan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Scheppele, 2018).

BAB 7

GLOBALISASI DAN TANTANGAN KEWARGANEGARAAN

A. ARUS GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA PADA NILAI SOSIAL BUDAYA

Globalisasi adalah suatu proses historis dan dinamis yang mengintegrasikan masyarakat di seluruh dunia melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan ekonomi. Dalam konteks budaya, globalisasi tidak hanya berarti pertukaran produk dan informasi, tetapi juga penyebaran nilai, norma, dan gaya hidup antarbangsa secara luas dan cepat. Fenomena ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem nilai sosial budaya masyarakat lokal, terutama ketika nilai-nilai global yang dominan seperti individualisme, konsumerisme, dan rasionalisme barat berinteraksi atau bahkan mendominasi nilai-nilai tradisional yang berbasis komunitas dan spiritualitas (Gajić *et al.*, 2017). Proses ini memunculkan dinamika kompleks antara pelestarian budaya lokal dengan adaptasi terhadap tuntutan global.

Salah satu bentuk nyata dari dampak globalisasi terhadap nilai sosial budaya adalah dominasi budaya populer global, seperti musik, film, dan *fashion*, yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial. Media digital berperan sebagai agen utama dalam mentransmisikan budaya global ke dalam ruang privat masyarakat lokal, terutama generasi muda. Akibatnya, terjadi perubahan orientasi nilai, di mana budaya lokal cenderung dianggap ketinggalan zaman, sementara budaya luar dipandang sebagai simbol modernitas dan prestise (Steger, 2013). Hal ini mengakibatkan penurunan minat terhadap bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian tradisional sebagai warisan budaya tak benda.

Namun demikian, hubungan antara globalisasi dan nilai budaya tidak selalu bersifat destruktif. Beberapa ahli berpendapat bahwa globalisasi juga dapat memperkuat identitas budaya lokal melalui apa yang disebut sebagai "glokalisasi", yaitu proses adaptasi budaya global sesuai konteks lokal (Cao, 2010). Dalam proses ini, masyarakat lokal tidak semata-mata menjadi korban globalisasi, melainkan turut berperan aktif dalam memilih, mengolah, dan menyesuaikan unsur budaya luar dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut. Ini menunjukkan bahwa nilai sosial budaya bersifat dinamis dan tidak statis.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa globalisasi juga memunculkan tantangan terhadap kearifan lokal, terutama dalam aspek keluarga dan relasi sosial. Struktur keluarga tradisional yang menjunjung tinggi hierarki, tanggung

BAB 8

HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN SOSIAL

A. KONSEP DASAR HAM DALAM PERSPEKTIF LOKAL DAN GLOBAL

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Konsep HAM berkembang dalam dua pendekatan utama: perspektif global (universalisme) dan perspektif lokal (relativisme budaya atau partikularisme). Para ahli memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi tentang bagaimana HAM dipahami dan dijalankan di berbagai belahan dunia.

1. Perspektif Global (Universalisme HAM)

Menurut Jack Donnelly *“...Hak asasi manusia berakar pada martabat manusia dan bukan pada kebudayaan tertentu...”* HAM bersifat universal, artinya hak-hak ini berlaku untuk semua manusia di mana pun mereka berada, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau negara. Ia menyatakan bahwa HAM adalah respons terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan dirancang untuk melindungi martabat manusia dari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga perlu dijamin dalam hukum internasional.

Henry J. Steiner dan Philip Alston, dua pakar hukum HAM internasional, berpendapat bahwa Deklarasi Universal HAM 1948 adalah dokumen yang mewakili kesepakatan global tentang nilai-nilai dasar seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Mereka mendukung pandangan bahwa meskipun dirumuskan dalam konteks Barat, prinsip-prinsip HAM dapat dan seharusnya diadaptasi secara luas karena menyangkut hak fundamental manusia.

2. Perspektif Lokal (Relativisme Budaya HAM)

Berbeda dari pendekatan universal, Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan pentingnya pendekatan kontekstual atau interkultural. Ia menolak pemaksaan konsep HAM Barat kepada masyarakat *non*-Barat tanpa memperhitungkan nilai budaya dan kepercayaan lokal. An-Na'im berpendapat bahwa budaya lokal seperti Islam, adat, atau sistem nilai Asia bisa menjadi dasar pembentukan HAM yang lebih diterima dan efektif secara lokal.

Koentjaraningrat *“...melalui kajiannya tentang sistem nilai budaya Indonesia...”* seorang antropolog Indonesia, menjelaskan bahwa dalam budaya Indonesia, konsep HAM harus mempertimbangkan nilai gotong royong,

BAB 9

KONFLIK SOSIAL DAN RESOLUSI DAMAI

A. AKAR SOSIOKULTURAL KONFLIK DI INDONESIA

Konflik sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas akar sosiokultural yang terbentuk sejak masa kolonial hingga era reformasi. Faktor historis seperti warisan kebijakan kolonial Belanda yang bersifat *divide et impera* telah menciptakan segmentasi etnis dan memperdalam kesenjangan sosial di antara kelompok pribumi dan *non*-pribumi, terutama etnis Tionghoa, Arab, dan Eropa. Ketegangan ini kerap muncul kembali dalam bentuk konflik horizontal, terutama ketika perbedaan kepentingan ekonomi dan sosial memuncak (van der Kroef, 1950). Pola pemisahan sosial dan akulturasi yang tidak merata menjadi penyumbang utama terhadap lahirnya ketidakpercayaan antar kelompok.

Salah satu akar konflik yang dominan adalah ketimpangan ekonomi yang ditumpangkan pada identitas etnis dan agama. Misalnya, dalam kasus konflik Muslim-Kristen di Indonesia antara 1995–1997, akar ketegangan bukan hanya masalah teologis, tetapi lebih pada ketimpangan distribusi sumber daya dan persepsi ketidakadilan, di mana umat Kristen dinilai lebih menikmati hasil pembangunan daripada umat Islam (Sukanto & Pramono, 2020). Ketimpangan ini diperparah oleh munculnya kebijakan-kebijakan negara dan fatwa keagamaan yang menambah ketegangan antar kelompok.

Selain itu, keberagaman budaya dan agama yang seharusnya menjadi kekayaan nasional, seringkali justru menjadi sumber konflik ketika tidak diiringi oleh pemahaman lintas budaya yang mendalam. Interaksi antara kelompok suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bisa memicu konflik ketika persepsi superioritas budaya atau dominasi politik muncul. Hal ini tercermin dalam konflik-konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan, yang tidak hanya dipicu oleh perbedaan etnis, tetapi juga oleh provokasi elite politik dan perebutan sumber daya lokal (Siddiq, 2005).

Peran agama juga menjadi instrumen ambivalen dalam konflik sosiokultural. Di satu sisi, agama menjadi alat pemersatu, namun di sisi lain sering digunakan sebagai legitimasi untuk memobilisasi massa dalam konflik. Hal ini diperparah oleh manipulasi simbol-simbol agama oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik atau ekonomi. Pada masa pasca-Orde Baru, meningkatnya kebebasan sipil tanpa penguatan etika dialog antarkelompok menyebabkan melonjaknya konflik dengan sentimen keagamaan (Tule, 2002).

BAB 10

LITERASI SOSIAL BUDAYA

KEWARGANEGARAAN DIGITAL

A. KONSEP LITERASI SOSIAL BUDAYA DI ERA DIGITAL

Literasi sosial budaya di era digital merupakan kemampuan individu dan kelompok dalam memahami, menafsirkan, serta berpartisipasi secara kritis terhadap dinamika budaya dan hubungan sosial yang berlangsung melalui media digital. Konsep ini lebih luas dari sekadar kemampuan menggunakan teknologi; ia mencakup pemahaman nilai, norma, dan simbol budaya yang berkembang dalam ekosistem digital. Menurut Buckingham (2003), literasi budaya mencakup kesadaran terhadap representasi sosial dalam media, kemampuan untuk menafsirkan makna simbolik, dan kesanggupan untuk berperan aktif dalam konstruksi makna secara kolektif. Dalam era internet dan media sosial yang mengglobal, kecakapan ini menjadi semakin penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, kritis, dan demokratis.

Era digital telah merevolusi cara individu berinteraksi, memproduksi, dan menyebarkan informasi budaya. Digitalisasi budaya menciptakan fenomena baru seperti “komunitas virtual”, “identitas daring”, dan “kebudayaan partisipatoris” (Jenkins *et al.*, 2006). Literasi sosial budaya memungkinkan masyarakat memahami bahwa budaya digital bukan hanya konsumsi konten, tetapi juga proses aktif dalam membentuk identitas, merumuskan opini, serta menciptakan ruang dialog antar kelompok yang berbeda. Tanpa literasi ini, masyarakat berisiko terseret dalam polarisasi, penyebaran hoaks, atau bahkan ujaran kebencian yang merusak kohesi sosial.

Di Indonesia, tantangan literasi sosial budaya diperparah oleh tingginya penggunaan media sosial yang belum diimbangi dengan kedewasaan digital. Survei APJII (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia aktif di media sosial, namun data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih tergolong rendah dalam aspek etika, budaya, dan keamanan digital. Hal ini menyebabkan mudahnya penyebaran narasi intoleransi, diskriminasi, dan stereotip etnis atau agama. Literasi sosial budaya di sini berperan untuk mengedukasi publik dalam membedakan antara kritik sosial dan ujaran kebencian, antara kebebasan berekspresi dan penyimpangan moral.

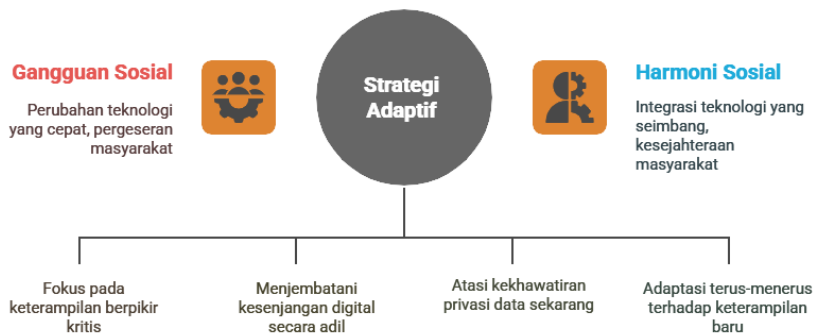
BAB 11

TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KARAKTER KEWARGAAN

A. DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan sosial yang begitu cepat, sehingga masyarakat dihadapkan pada beragam dinamika yang menuntut kemampuan menyesuaikan diri secara berkelanjutan. Transformasi ini bukan hanya berdampak pada cara manusia bekerja dan berinteraksi, tetapi juga pada bagaimana keseimbangan sosial perlu dijaga di tengah potensi gangguan yang muncul. Untuk memahami bagaimana proses adaptasi tersebut dapat dijalankan secara efektif, berikut disajikan ilustrasi yang merangkum pendekatan yang dapat digunakan dalam merespons perubahan sosial di era digital ini.

Menavigasi Perubahan Sosial di Industri 4.0



Gambar 11.1 Cara Menavigasi Perubahan Sosial di Era Industri 4.0

Gambar tersebut menjelaskan cara menavigasi perubahan sosial di era Industri 4.0 melalui pendekatan yang disebut dengan "Strategi Adaptif". Dalam penerapannya, menekankan empat aspek penting yang perlu dikelola secara bersamaan. Pertama, peningkatan keterampilan berpikir kritis sebagai fondasi agar individu mampu merespons perubahan secara rasional. Kedua, upaya menjembatani kesenjangan digital secara adil sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses setara terhadap teknologi. Ketiga, penanganan kekhawatiran terkait privasi data sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak digital warga. Keempat, kemampuan beradaptasi berkelanjutan terhadap keterampilan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi.

BAB 12

CONTOH PRAKTIK

PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA

KEWARGANEGARAAN DI MASYARAKAT

A. STUDI LAPANGAN: OBSERVASI DAN REFLEKSI SOSIAL BUDAYA

Studi lapangan menjadi sarana penting untuk memahami bagaimana nilai sosial budaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika masyarakat menghadapi perubahan akibat modernisasi. Melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan warga, peneliti dapat melihat bagaimana tradisi dipertahankan, disesuaikan, atau mengalami pergeseran. Untuk menggambarkan dinamika tersebut secara konkret, berikut ditampilkan contoh studi lapangan mengenai praktik gotong royong di Desa Pandanwangi, Kabupaten Sleman, beserta refleksi sosial budaya yang menyertainya.

Judul: Dinamika Gotong Royong di Tengah Modernisasi – Studi Lapangan di Desa Pandanwangi Kabupaten Sleman, Yogyakarta

1. Latar Belakang. Desa Pandanwangi merupakan salah satu desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang dikenal masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, terutama gotong royong. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial akibat modernisasi dan urbanisasi mulai memengaruhi pola interaksi warganya. Studi ini bertujuan untuk mengamati langsung bagaimana nilai gotong royong dijalankan, diadaptasi, atau bahkan ditinggalkan oleh masyarakat setempat, serta merefleksikan dinamika sosial budaya yang menyertainya.
2. Tujuan Observasi
 - a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk gotong royong yang masih dijalankan masyarakat.
 - b. Menganalisis perubahan perilaku sosial akibat pengaruh gaya hidup modern.
 - c. Merefleksikan pentingnya pelestarian nilai sosial budaya dalam masyarakat lokal.
3. Metode. Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara informal. Peneliti terlibat dalam kegiatan kerja bakti di dusun dan melakukan wawancara ringan dengan tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, serta pemuda desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Alsaleh, A., Alshawabkeh, A., Alzaidi, M., Alghamdi, F., & Algahtani, F. (2024). The impact of technological advancement on culture and society. *Scientific Reports*, 14(1), 83995. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83995-z>
- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Revised ed.). Verso.
- Aniga, O. I. (2024). Indigenous reconciliation practices among the ȬkȬnȬ society: Symbols, language, and rituals. *African Journal of Peacebuilding and Cultural Studies*, 12(1), 44–59.
- Anjarwati, S. (2013). Education for peace through storytelling: A case study in Southern Thailand. *Indonesian Journal of Education*, 2(1), 32–45.
- An-Na'im, A. A. (1992). *Human rights in cross-cultural perspectives: A quest for consensus*. University of Pennsylvania Press.
- Appiah, K. A. (2006). *Cosmopolitanism: Ethics in a world of strangers*. W. W. Norton & Company.
- Arjon, M. (2018). Kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial: Studi kasus peran tokoh adat di Sulawesi Tengah. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 87–98.
- Bakardjieva, M., Bruns, A., & Neumayer, C. (2018). The civic web: Young people, the Internet, and civic participation. MIT Press.
- Banks, J. A. (2004). *Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world*. *Educational Forum*, 68(4), 296–305. <https://doi.org/10.1080/00131720408984645>
- Banks, J. A. (2008). *An introduction to multicultural education* (4th ed.). Pearson Education.
- Banks, J. A. (2008). *Diversity, group identity, and citizenship education in a global age*. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Beck, U. (2006). *The cosmopolitan vision*. Polity Press.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press.
- Ben-xiu, L. (2010). Freedom of expression in the digital age. *China Legal Science*, 4(3), 45–59.

- Bercovitch, J. (2008). *Mediation in international conflicts: Theory and practice*. Palgrave Macmillan.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university: What the student does* (4th ed.). Open University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Buckingham, D. (2003). *Media education: Literacy, learning and contemporary culture*. Polity Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Revisi ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Busch, T. (2013). The governance of big data: Perspectives from public and private sectors. *Digital Ethics Journal*, 6(2), 10–22.
- Cao, Y. (2010). *Glocalization and regionalization: Two paradigms of cultural transmission in the global era*. *Intercultural Communication Studies*, 19(2), 1–11.
- Carnevale, P. J., Lim, R. G., & McLaughlin, M. E. (1993). Contingent mediation: The role of timing in conflict resolution. *Negotiation Journal*, 9(4), 359–372. <https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.1993.tb00798.x>
- Chotib, M. (2024). Peran tokoh adat dalam menjembatani relasi masyarakat dan pemerintah di Jambi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 59–73.
- Chun, S. A., Shulman, S., Sandoval, R., & Hovy, E. (2010). Government 2.0: Making Connections Between Citizens, Data and Government. *Information Polity*, 15(1-2), 1–9.
- Connolly, A. (2013). *Collective rights and individual freedoms: Finding balance in indigenous communities*. *Human Rights Law Review*, 13(1), 85–102. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngs043>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2000). *On democracy*. Yale University Press.
- Delanty, G. (2000). *Citizenship in a global age: Society, culture, politics*. Open University Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Dewi, M., & Elfiandri, E. (2024). *Pelatihan literasi media untuk meningkatkan ketahanan terhadap hoaks politik di kalangan remaja*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), 22–35.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.

- Druckman, D. (2011). Negotiating in the international context. In D. Druckman (Ed.), *Doing Research: Methods of Inquiry for Conflict Analysis* (pp. 219–236). Sage.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Etzioni, A. (1995). *The spirit of community: Rights, responsibilities and the communitarian agenda*. Fontana Press.
- Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth*. Grove Press.
- Fatimah, S., Yulianti, A., & Ramadhani, F. (2023). Media Sosial dan Kesehatan Mental Remaja: Studi Kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 12(2), 89–101.
- Figueiredo, C., Garcia, F., & López, A. (2024). *Digital identity and cultural authenticity: A cross-cultural perspective on virtual representation*. *Journal of Global Culture and Media*, 18(1), 55–73.
- Fırıncı, Y. (2018). *Cultural resilience in the age of globalization: Strategies for identity preservation*. *International Journal of Cultural Studies*, 21(3), 295–310. <https://doi.org/10.1177/1367877917713256>
- Fonseca, D., & Bettencourt, T. (2020). *Cyber citizenship education: Towards a framework for a responsible digital society*. *Journal of Digital Citizenship*, 3(1), 1–15.
- Franch, S. (2019). *Global citizenship education and subjectification: The democratic responsibility of teachers*. *Educational Philosophy and Theory*, 51(11), 1092–1102. <https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1553700>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2013). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge University Press.
- Gajić, M., Ivanović, M., & Petrović, I. (2017). *Globalization and cultural identity: Impacts and perspectives*. *Facta Universitatis*, 16(3), 261–270. <https://doi.org/10.22190/FUPSPH1703261G>
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2010). So What Difference Does it Make? Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. IDS Working Paper, 2010(347).
- Gay, G. (2010). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (2nd ed.). Teachers College Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Gerodimos, R. (2004). Online youth civic engagement: Reflections on the emergent role of the Internet in youth political participation. *Journal of Youth Studies*, 7(2), 179–199.
- Giddens, A. (2002). *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. Routledge.
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.

- Goodpaster, G. (1997). The negotiator as bridge builder. *Negotiation Journal*, 13(1), 17–35. <https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.1997.tb00091.x>
- Gordon, E., & Mihailidis, P. (2016). *Civic media: Technology, design, practice*. MIT Press.
- Gunawan, H. (2017). *Budaya politik digital di Indonesia: Peluang dan tantangan era media sosial*. *Jurnal Politik Profetik*, 5(1), 66–80.
- Gutmann, A. (1996). *Democratic education* (Revised ed.). Princeton University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Haetami, A. (2024). *Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sebagai strategi memperkuat identitas budaya bangsa*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 42–57.
- Halimah, L., & Guntara, D. (2017). Budaya Seren Taun sebagai kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 1–13.
- Halimah, L., Heryani, H., & Barus, E. E. (2020). Local Wisdom Preservation in Inter-Ethnic Weddings in Cimahi City's Batak Karo Community. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(1), 19–31.
- Halimah, L., Nasim, E. S., Tripalupi, R. I., Effendi, M., & Ichtat, H. Q. (2025). Pelatihan pembuatan nomor induk berusaha bagi UMKM guna memiliki legalitas usaha di Desa Gadobangkong Bandung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 73–81.
- Hall, S. (1996). Introduction: Who needs identity? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1–17). SAGE Publications.
- Hall, S. (1996). *Questions of cultural identity*. SAGE Publications.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Haryati, N., & Hidayati, F. (2017). *Penggunaan berita hoaks dalam pembelajaran berpikir kritis siswa SMA*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(3), 255–268.
- He, W., & Harris, K. (2020). The impact of digital technologies on social connectedness and well-being. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120299. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120299>
- Held, D. (1995). *Democracy and the global order: From the modern state to cosmopolitan governance*. Stanford University Press.
- Helskog, G. H. (2014). Philosophy with children as dialogic practice for democracy. *Studier i Pædagogisk Filosofi*, 3(1), 6–22. <https://doi.org/10.7146/spf.v3i1.12537>

- Hopster, J. (2021). What are socially disruptive technologies? *Technology in Society*, 65, 101602. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101602>
- Hoskins, B., d'Hombres, B., & Campbell, J. (2012). Does formal education have an impact on active citizenship behaviour? *European Educational Research Journal*, 7(3), 386–402. <https://doi.org/10.2304/eerj.2008.7.3.386>
- Hussein, A., Jaber, M., & Singh, S. (2023). Digital transformation and its impact on social well-being. *Journal of Social and Personal Relationships*, 40(7), 1904–1922. <https://doi.org/10.1177/02654075231170252>
- Hyman, H. H. (1959). *Political socialization: A study in the psychology of political behavior*. Free Press.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge University Press.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). *Citizenship studies: An introduction*. In E. F. Isin & B. S. Turner (Eds.), *Handbook of citizenship studies* (pp. 1–10). SAGE Publications.
- Islam, A. (2016). *Collective rights of indigenous peoples: A human rights perspective*. *International Journal of Human Rights*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1056500>
- Jamin, H. (2020). Kearifan lokal dan resolusi konflik: Perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(2), 233–247.
- Jansson, A., Lindell, J., & Fast, K. (2021). *Forced exposure, digital culture and identity: Being public in social media*. *Media, Culture & Society*, 43(3), 410–426. <https://doi.org/10.1177/0163443720925973>
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2006). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. MacArthur Foundation.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kashchey, V. (2021). *Digital identity transformation and social belonging in the post-information age*. *Cyberpsychology and Society*, 12(3), 205–224.
- Kasman, A., Sari, I., & Darmawan, B. (2022). *Pelestarian tradisi peusijek di tengah arus modernisasi budaya global*. *Jurnal Ilmu Sosial Budaya*, 10(2), 150–165.
- Keraf, S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Khramova, A. (2023). *Constructing identities in the digital sphere: The new social self*. *Journal of Digital Culture Studies*, 9(1), 33–49.
- Klein, J. T. (2010). *A taxonomy of interdisciplinarity*. In R. Frodeman (Ed.), *The Oxford handbook of interdisciplinarity* (pp. 15–30). Oxford University Press.

- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan, mentalitet dan pembangunan*. Gramedia.
- König, P. D., & Wenzelburger, G. (2024). Digitalization and societal transformation: Implications for social cohesion in modern societies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 144. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02244-4>
- Lahai, J. I., & Ware, H. (2013). Post-conflict peacebuilding through *community-based education* in Sierra Leone. *International Education Journal: Comparative Perspectives*, 12(2), 85–101.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lin, X., Chang, C., Zhang, Y., & Xu, C. (2022). *Digital citizenship and identity development: The role of social media in civic engagement of youth*. *Journal of Youth Studies*, 25(2), 251–269. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1892795>
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Johns Hopkins University Press.
- Lupin, D., & Townsend, L. (2025). *Representative speech and participatory rights in indigenous consultation processes*. *Journal of Indigenous Policy Studies*, 17(1), 45–63.
- MacIntyre, A. (1984). *After virtue: A study in moral theory* (2nd ed.). University of Notre Dame Press.
- Madjid, N. (1999). *Modernisasi tanpa sekularisasi: Islam, modernisasi dan keindonesiaan*. Paramadina.
- Mahmud, A. (2020). Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 33–45.
- Malatuny, I. (2018). Literasi media dan pendidikan kewarganegaraan: Peran media massa dalam membentuk opini publik. *Jurnal Komunikasi dan Kewarganegaraan*, 6(2), 44–55.
- Manik, A. H., & Suharno, A. (2020). Tradisi runggu dalam penyelesaian konflik komunitas Pakpak. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3), 355–368.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge University Press.
- Marzuki, M., Zakaria, N., Fiyul, A. Y., Halimah, L., & Arfiawati, F. (2025). *Pelatihan penggunaan sosial media untuk meningkatkan personal branding dan pemahaman komunikasi siswa SMK*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 49–56.

- Maulia, N., & Irawan, S. (2021). *Deliberative democracy and local wisdom: Integration in Indonesian political context*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 190–205.
- Mayoux, L. (2001). Tackling the down side: Social capital, women's *empowerment* and micro-finance in Cameroon. *Development and Change*, 32(3), 435–464.
- Mboh, M. N. (2022). Traditional leadership and conflict resolution in post-colonial South Africa: A case of Mahikeng. *Journal of African Studies*, 15(1), 25–38.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Morris, A. D., & Staggenborg, S. (2007). Leadership in social movements. In B. Klandermans & C. Roggeband (Eds.), *The handbook of social movements across disciplines* (pp. 171–196). Springer.
- Morris, A., & Staggenborg, S. (2007). Leadership in Social Movements. In *The Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 171–196). Oxford: Blackwell Publishing.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2004). *Indonesia's approaching election: Political optimism and its limits*. *Journal of Democracy*, 15(1), 117–130.
- Nazim, M., Ali, S. N., & Ahmed, K. (2024). *Role of libraries in countering disinformation and promoting civic engagement*. *International Journal of Library and Information Studies*, 14(1), 14–28.
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers & Education*, 59(3), 1065–1078.
- Nguyen, T., Taneja, H., & Menon, M. (2023). *Online self-presentation, identity coherence, and social anxiety among adolescents*. *Computers in Human Behavior*, 137, 107412. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107412>
- Norris, P. (2010). *Public sentinel: News media and the governance agenda*. World Bank Publications.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tujuh.
- Nurhayati, T., & Halimah, L. (2024). *Value and technology: Maintaining balance in social science education in the era of artificial intelligence*. *Proceedings of the International Conference on Applied Social Sciences in Education*, 1(1), 181–187.
- Nussbaum, M. C. (1997). *Cultivating humanity: A classical defense of reform in liberal education*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2002). *Education for citizenship in an era of global connection*. *Studies in Philosophy and Education*, 21(4–5), 289–303.

- <https://doi.org/10.1023/A:1019837105053>
- O'Reilly, M., Dogra, N., & Hughes, J. (2020). Ethics in digital mental health for children and adolescents. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 25(3), 715–726.
- OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/2030/>
- Ojo-Ebenezer, O. (2023). Cultural mediation and traditional justice in Okija, Nigeria. *African Journal of Law and Society*, 9(1), 102–119.
- Osler, A., & Pandur, T. (2019). *Education for peace in post-conflict Bosnia: Toward intercultural citizenship. Education, Citizenship and Social Justice*, 14(2), 185–198. <https://doi.org/10.1177/1746197918779930>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Papapicco, C., Marcucci, D., & Roversi, A. (2022). *Youth and fake news: Critical thinking and digital literacy in Italian high schools. Italian Journal of Sociology of Education*, 14(2), 129–151.
- Parameswara, M., & Wulandari, R. (2020). *Budaya sebagai basis pembangunan ekonomi komunitas: Studi kasus Desa Tigawasa, Bali. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 77–91.
- Pardede, E., Sari, M. E., & Pratama, R. (2023). Gaya Hidup Hedonis dan Konsumtif pada Remaja di Era Digital. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(1), 55–70.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Harvard University Press.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Harvard University Press.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Pike, G. (2008). *Citizenship education in global context: Ideals and realities. Journal of Curriculum Studies*, 40(6), 713–732. <https://doi.org/10.1080/00220270701684630>
- Prahassacitta, P. (2017). Citizen journalism dan tantangan hukum dalam era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 22–34.
- Pratiwi, D., & Wikantiyoso, R. (2022). *Kelembagaan adat dan keberlanjutan budaya dalam pariwisata: Studi kasus Desa Penglipuran. Jurnal Arsitektur Nusantara*, 11(1), 89–102.
- Print, M. (2007). *Citizenship education and youth participation in democracy. British Journal of Educational Studies*, 55(3), 325–345. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00380.x>

- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (2000). *Democracy, accountability, and representation*. Cambridge University Press.
- Puryanto, D. (2024). Narasi budaya dalam mediasi konflik adat: Studi pada komunitas Jawa-Kalimantan. *Jurnal Komunikasi dan Resolusi Konflik*, 10(1), 55–68.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahakbauw, L. (2023). Peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Biak. *Jurnal Antropologi Papua*, 15(1), 89–103.
- Rahman, M. M., & Uddin, M. N. (2017). *Changing family structures and their implications in the era of globalization*. *Asian Social Science*, 13(9), 39–47. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n9p39>
- Rasyid, M., Wulandari, A., & Nugroho, F. (2023). Kearifan lokal dalam penyelesaian konflik etnis dan agama di Surabaya dan Bali. *Jurnal Harmoni Sosial*, 9(1), 44–60.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Repko, A. F. (2012). *Interdisciplinary research: Process and theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Rheingold, H. (2012). *Net smart: How to thrive online*. MIT Press.
- Risberg, S. (2021). *Global citizenship education: Rethinking citizenship in a globalized world*. *Journal of International Social Studies*, 11(2), 34–50.
- Ritzer, G. (1999). *The McDonaldisation of society*. Pine Forge Press.
- Rüdiger, D., Vossen, H. G. M., & Valkenburg, P. M. (2021). *Self-presentation on social media: A cross-cultural comparison of Dutch and Chinese adolescents*. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 15(1). <https://doi.org/10.5817/CP2021-1-4>
- Russomanno, J. (2015). Free speech and the global digital landscape. *Global Media Journal*, 13(25), 33–47.
- Sandhu, K. (2014). *Educating for global citizenship: Challenges and opportunities*. *International Journal of Education and Research*, 2(5), 301–314.
- Sari, B., Fitria, D., & Arifianto, H. (2024). Etika digital dan tanggung jawab sosial netizen: Kajian fenomenologi di Indonesia. *Jurnal Etika Media*, 8(1), 11–27.
- Sari, R. N., Utami, D. A., & Andriani, T. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Peningkatan Kesehatan Anak di Daerah Urban. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 11(3), 140–152.
- Scheppele, K. L. (2018). *Democracy by judiciary: Or, why courts can be bulwarks of democracy*. *University of Chicago Law Review*, 85(2), 441–466.

- Schmid, S.-P. (2023). *Collective rights and democratic legitimacy in multiethnic societies*. *Comparative Politics Review*, 44(2), 110–130.
- Schunk, D. H. (2012). *Learning theories: An educational perspective* (6th ed.). Pearson.
- Sen, A. (2004). *Elements of a theory of human rights*. *Philosophy & Public Affairs*, 32(4), 315–356.
<https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2004.00017.x>
- Sen, A. (2006). *The argumentative Indian: Writings on Indian history, culture and identity*. Penguin Books.
- Sharma, R., & Alam, M. (2016). Legal dimensions of freedom of expression on the Internet. *Journal of Cyber Law*, 14(1), 1–15.
- Sheykhjan, T. M. (2017). Digital citizenship: A necessity for 21st-century learners. *Journal of Digital Learning*, 5(2), 18–25.
- Siddiq, H. (2005). Konflik horizontal dan politisasi identitas di Maluku dan Kalimantan. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 55–72.
- Sjoraida, D., Hidayat, R., & Supriyadi, A. (2024). Media digital dan pembentukan opini publik: Studi di kalangan generasi milenial. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 9(1), 55–72.
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. University of Nevada Press.
- Soekarno. (1945, June 1). *Pidato Lahirnya Pancasila*.
- Steger, M. B. (2013). *Globalization: A very short introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Steiner, H. J., & Alston, P. (2000). *International human rights in context: Law, politics, morals* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Sudi, R., Hidayati, N., & Mahendra, Y. (2024). Privasi digital dan keamanan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Siber*, 7(2), 90–104.
- Sukanto, A., & Pramono, B. (2020). Dinamika konflik Muslim-Kristen di Indonesia: Analisis dari perspektif sosio-religius. *Jurnal Kajian Agama dan Masyarakat*, 11(2), 111–126.
- Sullivan, T. (1984). Resolving development conflict through mediation: Land use and environmental issues. *Conflict Resolution Quarterly*, 2(1), 45–61.
- Svensson, J., Dahlgren, P., & Sandvik, K. (2009). The performative function of citizen media. *Journal of Communication Inquiry*, 33(4), 354–369.
- Tabinga, J. (2024). Education, memory, and reconciliation in Zimbabwe: Risks of partisan peacebuilding. *Journal of Post-Conflict Education Studies*, 6(2), 63–79.
- Tan, D., & Pramudito, A. (2022). *Simulasi deteksi hoaks sebagai strategi pembelajaran literasi digital di kalangan pelajar*. *Jurnal Edukasi Digital*, 4(2), 100–114.

- Tijow, A. E., Anggraeni, N., & Situmorang, Y. (2024). Cross-cultural mediation in post-conflict Indonesia: Towards inclusive peacebuilding. *Journal of Southeast Asian Peace Studies*, 5(1), 14–31.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2015). Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Triono, S., & Medaline, F. (2022). Kajian kritis terhadap UU ITE dalam kerangka hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 215–230.
- Tripathi, R. (2024). *Digital ethics and identity ownership: Safeguarding the self in the age of data capitalism*. *Journal of Media Ethics and Technology*, 15(1), 12–28.
- Tule, P. (2002). Politik simbolik agama dalam konflik sosial di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 26(3), 71–88.
- Tusalem, R. F. (2015). *The role of elections in promoting democracy: Do electoral processes reduce political inequality?* *International Political Science Review*, 36(1), 55–71.
<https://doi.org/10.1177/0192512113507374>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- UNESCO. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111609>
- UNESCO. (2001). *Universal declaration on cultural diversity*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.
<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

- Van der Kroef, J. M. (1950). The problem of the Chinese minority in Indonesia. *Far Eastern Survey*, 19(14), 161–165.
- Van, T. Q. (2024). *Comparative global citizenship education policies in Southeast Asia: Opportunities and disparities*. *Asian Education Review*, 6(1), 1–20.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. University of Chicago Press.
- Vivier, E. (2023). Local leadership and social audits: Strengthening accountability in South African communities. *Journal of Public Administration*, 58(1), 102–118.
- Wampler, B. (2010). *Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability*. Penn State Press.
- Wang, H. (2008). *Globalization and hybridization in cultural identity formation: A critical analysis*. *Journal of Global Cultural Studies*, 3(1), 18–34.
- Wuli, T., Surbakti, T., & Hasibuan, M. (2019). Reformasi kebijakan konflik sosial: Tinjauan kritis terhadap UU No. 7 Tahun 2012. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 90–105.
- Xanthaki, A. (2012). *Indigenous rights and United Nations standards: Self-determination, culture and land*. Cambridge University Press.
- Yusuf, A. F., Ramadhan, D., & Wahyuni, N. (2023). Media Digital dan Pembentukan Gaya Hidup Generasi Z. *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(2), 22–35.
- Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis*. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). Springer.
- Zolfaghari, M. S. (2023). The impact of digital disruption on organizational sociology. *Digital Transformation and Administration Innovation*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.18280/jdtai.010104>

PROFIL PENULIS

Dr. Lili Halimah, M.Pd.



Penulis dosen Program Studi PPKn dan Magister PIPS STKIP Pasundan yang beralamat di Jl. Permana No 32 B Cimahi 40512 Telp (022) 6628311 Fax. (022) 6630345. Telah menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Pendidikan Strata 1 di STKIP Pasundan Lulus tahun 1994, Program Magister (S-2) PIPS UPI Lulus Tahun 2006, dan Program Doktoral PKN UPI Lulus tahun 2014.

Saat ini bertempat tinggal Komplek Permana Indah Jl. Bangbara No. 25, Rt. 04/13, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi Utara, Kode Pos 40512. Jabatan Akademik yang telah dicapai saat ini adalah Lektor Kepala SK No. 73371/A3/Kp.05.01/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Pangkat dan Golongan Pembina Tingkat I/IVb SK No. 65172/B/7/2023 tanggal 20 November 2023. Alamat e-mail: lili.halimah@gmail.com ID Sinta: 6653138. ID Orchid: <https://orcid.org/0000-0003-0347-7835>. ID Scopus: 57915414900.

Jabatan dan kegiatan yang pernah diberikan kepada penulis yaitu sekretaris UPT Perpustakaan STKIP Pasundan tahun 2005 s.d. 2007, sekretaris UPT PPL STKIP Pasundan tahun 2007 s.d. 2009, ketua Program Studi PPKn STKIP Pasundan tahun 2010 s.d. 2018, kepala UPT PPL dan *Microteaching* dari tahun 2018 s.d. 2024, ketua Yayasan PAUD Melati Bangsa Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi tahun 2010 s.d. 2018, asesor Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 134 Universitas Pasundan Bandung tahun 2010 s.d. 2016, pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) tahun 2013 s.d. 2016, instruktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Unpas dari tahun 2021 s.d. sekarang, Sejak tahun 2021 s.d. 2024 menjadi fasilitator sekolah penggerak dengan sekolah dampingan di Kabupaten Sukabumi. Dewan Pakar pada Perhimpunan Dosen dan Peneliti Indonesia (PDPI) DPW Provinsi Jawa Barat s.d. tahun 2027, Dewan Penasihat pada Forum Komunikasi Dosen (FKD) s.d. tahun 2028. Bidang Pendidikan pada Pengurus Yayasan Pasundan Cabang Kota Cimahi sd 2028.

Penulis aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni), Tim Penyusun Soal USBN SMA KBB, Tim Pengembang Buku Pedoman HAM bagi Siswa Puskurbuk Kemendikbud, Tim Juri Olimpiade Cerdas Cermat Nilai-Nilai Kepahlawanan Depsos Provinsi Jawa Barat, narasumber Diskusi Terpumpun

(DKT) Seleksi Naskah Anugerah Konstitusi Tingkat Nasional Dirjen GTK Kemdikbud, narasumber Diskusi Terpumpun (DKT) Penyusunan Pedoman Seleksi Anugerah Konstitusi Dirjen GTK Kemdikbud, Tim Juri Inovasi Pembelajaran (Inobel) Tingkat SMP Kota Cimahi Penyelenggara PGRI Kota Cimahi, Tim Juri Pelajar Pancasila Antar-SMP se-Kota Cimahi Penyelenggara MGMP SMP PPKn Kota Cimahi.

Buku yang penulis hasilkan adalah buku *Pendidikan Kewarganegaraan dan Kosmopolitan* tahun 2018, buku *Saling Kelindan Nilai Kosmopolitan, Etnisitas, dan Nasionalisme* tahun 2023, *Bunga Rampai Filsafat Moral: Memahami Filsafat Manusia dan Moralitas* tahun 2024. Pengantar Pendidikan AntiKorupsi tahun 2024, *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* tahun 2025, *Pendidikan Pancasila Bagi Perguruan Tinggi* tahun 2025, *Kepemimpinan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa Dalam Pembangunan Desa Mandiri* tahun 2025, dan *Microteaching Suatu Pengantar* tahun 2025. Penulis juga telah menghasilkan karya tulis ilmiah yang telah terpublikasi, baik pada jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal nasional sejak tahun 2014 s.d. sekarang.

KONSEP DAN PRAKTIK PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN

Buku "Konsep dan Praktik Pendidikan Sosial Budaya Kewarganegaraan" ini hadir sebagai panduan komprehensif dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kewargaan, sosial, dan budaya dalam pendidikan. Mengusung pendekatan interdisipliner yang berpijak pada konteks Indonesia yang majemuk, buku ini mengulas konsep-konsep dasar hingga praktik nyata yang membentuk warga negara yang aktif, demokratis, dan berkarakter. Buku ini disusun dengan bahasa yang sistematis dan reflektif, sangat relevan bagi mahasiswa S1 maupun S2 bidang pendidikan, PPKn atau IPS, bagi guru satuan pendidikan SMP/SMA/SMK yang ingin memperkuat pendekatan nilai dalam pembelajaran, serta dosen dan pembaca umum yang tertarik pada isu pendidikan kebangsaan, multikulturalisme, dan transformasi sosial.

Topik-topik penting seperti identitas nasional, kearifan lokal, literasi digital, demokrasi, hak asasi manusia, hingga kewarganegaraan global dibahas secara mendalam, lengkap dengan pendekatan aplikatif yang kontekstual. Buku ini merupakan rujukan penting bagi siapa saja yang ingin menjembatani teori dan praktik dalam membentuk warga negara yang cerdas secara sosial, berbudaya, dan bertanggung jawab secara moral.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Perorangan Buku
0815-7000-699

Pendidikan

ISBN 978-634-246-442-7



9

786342

464427